

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MAJELIS HAKIM DALAM
MEMUTUS PERKARA TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK
YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH SEBAGAI AKIBAT
PERCERAIAN**

**(Studi Kasus Perkara Perceraian No. 823/Pdt.G/2011/PA.Mlg Di
Pengadilan Agama Malang)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

NADYA AULIANA
NIM. 115010109111003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MAJELIS HAKIM DALAM
MEMUTUS PERKARA TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK
YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH SEBAGAI AKIBAT
PERCERAIAN**

**(Studi Kasus Perkara Perceraian No. 823/Pdt.G/2011/PA.Mlg Di
Pengadilan Agama Malang)**

Nadya Auliana

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Email : nadya.auliana@gmail.com

ABSTRAKSI

Sesuai hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa yang menjadi faktor-faktor penyebab Majelis Hakim dalam memutus perkara terhadap pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah sebagai akibat perceraian tersebut terdapat dua faktor yang paling mendasar yaitu, faktor spiritual dan faktor materi. Di samping itu, ada pula bentuk penerapan mengenai pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* dalam Perkara No.823/Pdt.G/2011/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pasal tersebut akan berlaku mutlak dalam kondisi normal, apabila ibu dari anak tersebut berbudi pekerti, berakhlak yang baik dan terpuji. Tetapi sebaliknya apabila ibu dari anak tersebut mempunyai kepribadian dan akhlak yang tercela, maka pasal tersebut tidak lagi mengikat dan patut dikesampingkan.

Kata Kunci : Faktor-faktor, Pemeliharaan Anak, Mumayyiz.

ABSTRACT

According to the results of research, the author answers to existing problems in the that factors The Judge in the case ruled against the maintenance of a child who has not otherwise to the father as a result of the divorce are two of the most basic factors, spiritual and material factors. In addition, there is also the application form regarding the care of children who have not *mumayyiz* in Case No.823/Pdt.G/2011/PA.Mlg in Malang Religious Court under the provisions of Article 105 point (a) Compilation of Islamic Law. However, the chapter will hold up under normal conditions, when the mother of the child virtuous character, moral good and commendable. But otherwise if the mother of the child who has the personality and character beyond reproach, then the article is no longer binding and should be ruled out.

Keyword : Factors, Child Custody, Mumayyiz.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, baik bagi perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana tenteram, damai dan rasa, kasih sayang antara suami isteri dan anak-anak mereka.¹

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. Namun kenyataan sejarah umat manusia yang telah berusia ribuan tahun telah membuktikan bahwa tidak selalu itu dapat dicapai, bahkan sebaliknya kandas ataupun gagal sama sekali di tengah jalan, karena tidak tercapainya kata sepakat atau karena olehnya salah satu pihak ataupun perilaku kedua belah pihak yang bertentangan dengan ajaran Agama.²

Setelah Perkawinan putus karena perceraian, maka sejak perceraian itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dalam arti telah tidak ada upaya hukum lain lagi oleh para pihak, maka berlakulah segala akibat putusnya Perkawinan karena perceraian. Jika dari Perkawinan yang telah dilakukan terdapat anak, maka terhadap anak tersebut berlaku akibat perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974. Dari ketentuan pasal diatas terdapat contoh Perkara No. 823/Pdt.G/2011/PA.Mlg mengenai perceraian. Hal tersebut tidak dapat di

¹ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perdata Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 1993, hlm. 64

² *Ibid*, hlm. 74.

hindarkan oleh para pihak yang berperkara akibat tidak ada hubungan yang harmonis sehingga menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangganya. Maka dirujuk jalan yang terbaik dengan cara melakukan perpisahan yaitu perceraian.

Dalam hal ini yang paling penting diperhatikan dalam menentukan pemberian anak adalah kepentingan anak itu sendiri. Dalam arti akan dilihat siapakah yang lebih mampu menjamin kehidupan anak, baik dari segi materi, pendidikan formal, pendidikan akhlak dan kepentingan-kepentingan lainnya. Untuk menentukan orang yang paling dapat di percaya untuk memelihara anak, di dalam pengadilan biasanya Hakim akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, informasi ini dapat berasal dari saksi-saksi yang biasanya dihadirkan dalam persidangan.

Pemeliharaan terhadap anak sangatlah penting karena Islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak. Pertama, kedudukan dan hak anak, kedua, pembinaan sepanjang pertumbuhannya. Pemeliharaan anak dalam Hukum Islam lebih di kenal dengan sebutan *hadanah*, yang berarti pemeliharaan anak-anak laki-laki atau perempuan yang sudah besar, tetapi belum disebut dengan *tamyiz* dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.³

Dalam menentukan siapa yang lebih berhak melakukan pengasuhan, dibedakan antara anak yang belum *mumayyiz* dan anak yang *mumayyiz*. Anak yang sudah dianggap *mumayyiz* apabila telah mampu makan, minum dan buang air sendiri. Ada yang memberikan batasan sampai umur tujuh tahun.

³ Ali Yafie, **Teologi Sosial Telaah Kritis terhadap Persoalan Agama dan Kemanusiaan**, cet.1, LKPSM, Yogyakarta, 1997, hlm.7.

Pada tahapan perkembangan ini, orang tua diwajibkan untuk memerintahkan anaknya untuk melakukan sholat supaya kelak apabila sudah dewasa (*mukallaf* atau *baligh*) menjadi terbiasa dan terlatih. Apabila anak sudah *mumayyiz*, maka dia berhak memilih ikut ayah atau ibunya. Setelah dewasa, anak relatif lebih mandiri dan ketergantungan kepada ibunya berkurang dibandingkan dengan anak yang belum dewasa. Pada saat yang sama, anak sudah mampu membuat penilaian dan keputusan mengenai apa yang terbaik bagi dirinya dalam batas-batas tertentu.

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu penulis ingin meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab Majelis Hakim dalam memutus perkara terhadap pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah sebagai akibat perceraian No. 823/Pdt.G/2011/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi Faktor-faktor penyebab Majelis Hakim dalam memutus perkara terhadap pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah sebagai akibat Perceraian?
2. Bagaimana bentuk penerapan mengenai pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* dalam Perkara No.823/Pdt.G/2011/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang?

C. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris. Penelitian Hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian Hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan karena penelitian Hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berusaha melihat efektifitas hukum yang terdapat didalam masyarakat dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.⁵ Alasan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu dimaksudkan untuk menganalisis tentang dinamika mengenai faktor-faktor Majelis Hakim dalam memutus perkara terhadap hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah sebagai akibat perceraian di Pengadilan Agama Malang.

Jenis dan Sumber data primer diperoleh dengan melakukan wawancara secara terbuka dengan menggunakan pedoman wawancara agar dapat memperoleh data yang mendalam terkait objek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dimana penulis mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang didapatkan dari PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974, Putusan Perkara

⁴ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 15-16.

⁵ Soejono Soekanto, **Pengantar Ilmu Hukum**, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 6.

Perceraian No.823/Pdt.G/2011/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang dan Kompilasi Hukum Islam.

Teknik Pengumpulan Data Primer yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara bebas terpimpin dengan Hakim yang bersangkutan dalam kasus perkara perceraian tersebut. Dalam wawancara (*interview guide*) ini peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas, tetapi masih terpimpin karena adanya (*interview guide*) sebagai pedoman untuk mengontrol relevan tidaknya isi wawancara sehingga pertanyaannya tidak keluar dari pokok permasalahan. Dan teknik pengumpulan data sekunder dengan cara melakukan studi kepustakaan dimana penulis akan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur dan peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian, dengan cara dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen, keterangan dan catatan-catatan yang diperlukan dari masalah yang diteliti di Pengadilan Agama Malang.

Teknis analisis data adalah cara untuk mengkaji, mengolah dan membahas informasi yang diperoleh dari penelitian secara ilmiah.⁶ Data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu dengan cara menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang diperoleh dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, peraturan-peraturan yang berlaku dan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas, sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk dapat memahami dan menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

⁶ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 24

D. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Malang berkedudukan di wilayah Kota Malang, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ibu kota Propinsi Jawa Timur, dengan kedudukan antara 705'–802' LS dan 1126'–127' BT. Dengan Alamat Jalan Raden Panji Suroso No. 1 Malang, Nomor Telp/Fax (0341) 491812. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang meliputi wilayah Kota Malang yang terdiri dari 6 (Enam) Kecamatan dan 56 (Lima puluh enam) Kelurahan.

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Malang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Visi dan misi Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan, visinya yaitu, melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan, didukung Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN, memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. Sedangkan Misi Badan Peradilan yaitu, menjaga kemandirian

badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan.

Adapun sasaran Pengadilan Agama Malang Kelas I A yaitu, berhasil mengaktualisasikan nilai-nilai, baik interistik maupun eksteristik dari nilai-nilai hukum Islam dan nilai-nilai yang bersumber dari UUD tahun 1945 dalam praktek peradilan sehari-hari, tercapainya penyelesaian administrasi perkara, baik yang menjadi sisa perkara maupun perkara yang diterima pada tahun berjalan, Tercapainya tertib administrasi dan penegakkan hukum di Pengadilan Agama Malang Kelas I A.

2. Gambaran Posisi Kasus Perkara No. 823/Pdt.G/2011/PA.Mlg Di Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengasuhan Anak dengan Perkara No. 823/Pdt.G/2011/PA.Mlg adalah sebagai berikut :⁷

- a. Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 Januari 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kidul Kabupaten Blitar dengan Kutipan Akta Nikah 242/8/I/2000, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang lahir di Malang pada tanggal 18 Januari 2000

⁷ Bagian Identitas, dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Malang No. 823/Pdt.G/2011/PA.Mlg, hal. 1.

berdasarkan surat kutipan akta kelahiran dari Kantor pencatatan sipil Kota Malang dengan No. Akta Kelahiran 1829/Tlb/2005, yang bertempat tinggal sekarang di Asrama Katholik “Sang Timur” Kotatif Batu.

- b. Kemudian Pemohon dan Termohon telah mengajukan permohonan perceraian dan telah bercerai di Pengadilan Agama Malang yang mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 2 Desember 2008 dengan Akta Cerai No. 101/AC/2009/PA.Mlg. Dalam putusan perkara No. 1349/Pdt.G/2008/PA.Mlg tersebut belum disebutkan mengenai hak asuh anak atas nama Wahyu Setiawan. Pemohon sangat menghawatirkan perkembangan jiwa, kepribadian, dan masa depan anak tersebut, karena :

- 1) Termohon menghalang-halangi dan tidak memfasilitasi Pemohon untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak Pemohon, Termohon juga memutuskan hubungan silaturahmi antara anak dan Ayah kandungnya. Dengan segala upaya Pemohon mencarinya dengan membutuhkan proses yang panjang dan tidak mudah sampai akhirnya Pemohon mendapatkan anaknya itu dititipkan di Asrama Katholik “Sang Timur” Kotatif Batu tanpa ibu kandungnya
- 2) Setelah putusan cerai yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Malang No. 1349/Pdt.G/2008/PA.Mlg, anak Pemohon yang hidup bersama Termohon telah pindah sekolah sebanyak 4 (Empat) kali dan tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon, hal ini sangat mempengaruhi kondisi psikologis anak.

- c. Selama di Asrama Katholik “Sang Timur” ibu kandungnya yaitu mantan isteri Pemohon tidak dapat mengasuh dan memberikan pemeliharaan secara langsung. Karena saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya serta domisili secara pasti. Selama anaknya masuk dan berada di Asrama tidak ada pelajaran atau ajaran yang mengajarkan sesuai dengan Akidah Agamanya yaitu “Islam”. Sedangkan anaknya itu masih kecil dan butuh bimbingan dan pondasi yang kuat untuk agamanya, karena sejak lahir beragama Islam.
- d. Permohonan hak pengasuhan ini Pemohon ajukan agar anak dapat dengan pasti berada di bawah pengasuhan Pemohon serta guna memperlancar dan mendapat hak untuk pengurusan segala administrasi anak di kemudian hari, mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan diasuh sepenuhnya oleh Pemohon.

3. Faktor-Faktor Penyebab Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Sebagai Akibat Perceraian.

Istilah kuasa hak asuh anak merujuk kepada kepada arti kekuasaan seseorang ayah, ibu, nenek, lembaga, berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Sampai saat ini belum ada Peraturan Perundang-undangan yang jelas dan tegas bagi hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan siapa yang berhak atas kuasa hak asuh anak dalam perkara perceraian. Karena tidak ada aturan yang jelas maka pada umumnya secara baku, hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua tersebut serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun nonmateri.

Berdasarkan penelitian penulis dengan responden Drs. Munasik, M.H para Majelis Hakim di Pengadilan Agama Malang tentang faktor-faktor penyebab Majelis Hakim dalam memutus perkara terhadap pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah sebagai akibat perceraian. Ada 2 (dua) faktor yang paling mendasar, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.⁸

1. Faktor Spiritual

Yang dimaksud Faktor Spiritual itu adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki. Dan juga suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung dengan Tuhan, atau apa pun yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Spiritual juga berarti kejiwaan, rohani, bathin, mental dan moral. Dalam putusan Perkara No. 823/Pdt.G/2011/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang dapat dilihat faktor yang paling utama dalam memutus

⁸ Hasil Wawancara dengan Drs. Munasik, M.H, Hakim Pengadilan Agama Malang, Pada tanggal 28 May 2013.

perkara terhadap pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah sebagai akibat perceraian yaitu dilihat dari segi Akidah anak itu sendiri dan orang tuanya.

Sesuai dengan posisi kasus Perkara No. 823/Pdt.G/2011/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang dan dari hasil wawancara dengan responden pihak Pemohon yang telah ditentukan mengatakan, bahwa yang sangat penting disini Pemohon tidak berkenan karena tidak adanya koordinasi antara Termohon dan Pemohon. Ibu kandungnya sendiri yang telah menitipkannya ke Asrama Katholik “Sang Timur” Kotatif Batu, dengan alasan karena selama anaknya masuk dan berada di Asrama tersebut tidak ada pelajaran atau ajaran yang mengajarkan sesuai dengan Akidah agamanya yaitu Islam. Sedangkan anaknya tersebut masih kecil, butuh bimbingan dari orang tua dan pondasi yang kuat untuk Agamanya. Karena sejak lahir beragama Islam sehingga Pemohon mengkhawatirkan perkembangan Akidah Agama anaknya.⁹

Dalam kasus Perkara Perceraian yang penulis teliti sesuai dengan putusan Perkara No. 823/Pdt.G/2011/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang, sudah jelas bahwa dari pihak Ibunya sendiri menginginkan untuk mengubah Akidah anak itu yang sejak lahir telah beragama Islam untuk masuk ke agama Katholik. Yang dengan sengaja Ibunya tersebut menitipkan anaknya ke Asrama Katholik “Sang Timur” Kotatif Batu.

⁹ Hasil Wawancara dengan IP (Pemohon dalam Putusan Perkara No. 823/Pdt.G/2011/PA.Mlg), Pada tanggal 16 Mei 2013.

Karena dilihat dari akhlak Ibunya sendiri yang tidak baik dan sejak awal sebelum melangsungkan pernikahan dengan Pemohon sudah beragama Katholik. Ibu kandungnya sendiri tidak bertanggungjawab dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Ibu untuk mengasuh, memelihara, merawat dan mendidik anak dengan baik. Yang seharusnya anak itu sekolah, ini tidak disekolahkan. Untuk kenyamanan anak, keselamatan, pendidikan, dari segi Akidah anak itu yang terancam karena anak itu ditiptkan ke Asrama Katholik, dan juga kemampuan finansial yang menjadi dasar pertimbangan hakim.¹⁰

2. Faktor Materi

Yang dimaksud Faktor Materi adalah dilihat dari segi kemampuan biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang merupakan masalah penting untuk menjamin sebab anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut tidak tahu menahu dan tidak bersalah atas perceraian orang tuanya. Pada dasarnya bagi anak yang belum *mumayyiz* itu hak asuhnya ada pada Ibunya, tetapi secara materi atau biaya hidupnya ada dari Ayahnya. Apabila Ayah tidak bertanggungjawab dan tidak mampu dari segi materi maka pemeliharaan anak itu akan berada di pihak Ibunya.

Hak asuh anak itu bukan hanya dilihat untuk kepentingan baik Ayah maupun Ibunya, tetapi juga dilihat untuk kepentingan anak itu

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Drs. Munasik, M.H, Hakim Pengadilan Agama Malang, Pada tanggal 28 May 2013.

sendiri. Demi kepentingan dan kebutuhan si anak setelah terjadinya perceraian, secara umum anak berhak mendapatkan :

- a. Kasih sayang meskipun orang tuanya sudah bercerai.
- b. Pendidikan.
- c. Perhatian kesehatan.
- d. Tempat tinggal yang layak.¹¹

Menurut Drs. Munasik, M.H, Hakim Pengadilan Agama Malang keempat unsur diatas yang paling dasar harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak, jika mereka bercerai. Tetapi tidak bisa dipungkiri pula bahwa ada orang tua yang bercerai namun salah satu pihak tidak memenuhi hak-hak anak sehingga hak-hak anak tersebut terabaikan.¹² Biaya mengasuh anak dibebankan kepada Ayah anak. Segala sesuatu yang diperlukan anak diwajibkan kepada ayah untuk mencukupkannya.

Prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam pemeliharaan hak asuh anak ini adalah kemaslatan dan kemanfaatan bagi anak tanpa memperhatikan hak Ibu atau Ayahnya. Dimana dalam kenyataannya sekarang ini anak yang dititipkan oleh Termohon di Asrama Katholik “Sang Timur” Kotatif Batu, telah diambil oleh Pemohon dan tinggal di rumah Pemohon, diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon di lingkungan tempat kediaman Pemohon.

¹¹ Adib Bahari, **Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 161.

¹² Hasil Wawancara dengan Drs. Munasik, M.H, Hakim Pengadilan Agama Malang, Pada tanggal 28 May 2013.

Dan Pemohon cukup cakap, penuh tanggung jawab dan mempunyai kemampuan dari segi finansial untuk membiayai kebutuhan anak tersebut. Dalam putusan ini sudah jelas bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim bahwa anak dari Pemohon dan Termohon yang menjadi pijakan dalam pemeliharaan hak asuh anak ini lebih kemaslatan dan bermanfaat tinggal di rumah kediaman bersama dengan Pemohon dan menyatakan bahwa pemegang hak pemeliharaan anak tersebut di tetapkan kepada Pemohon sebagai Ayah kandungnya sendiri.¹³

4. Bentuk Penerapan Mengenai Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayyiz Dalam Perkara No.823/Pdt.G/2011/PA.Mlg Di Pengadilan Agama Malang

Berdasarkan hasil wawancara Dra. Hj. Rusmulyani, Hakim Pengadilan Agama Malang, pada dasarnya di Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, seorang anak yang belum *mumayyiz* atau berumur di bawah 12 Tahun akan lebih butuh belaian kasih sayang ibu, sehingga pada dasarnya anak itu ikut ibu. Hal ini dapat di maklumi mengingat ibu yang mengandung selama sembilan bulan dan ibu pula yang menyusui anak tersebut.

Kedekatan antara ibu dan anak tentunya bukan hanya kedekatan lahiriah semata, tetapi juga kedekatan bathin. Namun meskipun pada prinsipnya hak asuh anak jatuh ketangan ibunya. Kompilasi Hukum Islam

¹³ Putusan Pengadilan Agama Kota Malang No. 823/Pdt.G/2011/PA.Mlg, hal. 9.

masih memberi kesempatan kepada anak untuk memilih ikut ayah atau ibunya. Pilihan itu diberikan kepada anak yang telah *mumayyiz*, yaitu seorang anak yang telah berusia 12 Tahun.¹⁴

Dalam penelitian ini Penulis memfokuskan mengenai pengasuhan anak setelah perceraian yang didalamnya terdapat permohonan mengenai pengasuhan anak. Seorang anak yang belum berusia 12 Tahun oleh hukum dianggap belum dapat menentukan pilihannya sendiri ketika kedua orang tuanya bercerai yaitu, mengikuti ayah atau ibunya.

Apabila pemegang hak asuh anak, baik Ayah maupun Ibunya tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya kehidupan anak telah tercukupi, maka kerabat yang bersangkutan dapat meminta kepada Pengadilan Agama untuk memindahkan hak asuh anak tersebut kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh. Siapapun yang memegang hak asuh anak tersebut dan semua biaya hak asuh dan nafkah anak merupakan tanggungjawab Ayahnya. Tanggungjawab tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa.¹⁵

Dalam menentukan hak atas pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian, baik menurut ulama dan Kompilasi Hukum Islam keduanya menetapkan hak pengasuhan anak diberikan kepada Ibunya, selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Walaupun Ibu adalah pihak yang berhak untuk mengasuh anak hal tersebut tidak menutup

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Dra. Hj. Rusmulyani, Hakim Pengadilan Agama Malang, Pada tanggal 21 Juni 2013.

¹⁵ Achmad Ichsan, **Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam**, CV. Muliasari cet. 1, Jakarta, 1996, hlm. 50.

kemungkinan bagi Ayah untuk memperoleh hak tersebut apabila ibu selaku pemegang hak mengabaikan tugasnya atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan hak asuh yang diperolehnya.¹⁶

Dalam Praktiknya, tentu saja belum pasti anak akan ikut Ibunya atau mantan isterinya dalam perceraian. Hal ini didasari oleh alasan, Hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua baik Ayah maupun Ibunya tersebut serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi, maupun nonmateri.

Maka yang menjadi hal sangat penting bagi para pihak suami dan isteri untuk memberikan argumentasi hukum di persidangan agar bisa mendapatkan hak asuh anak. Namun semua itu tentu akan sangat bergantung pada kebijakan hakim dan sejauh mana hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan yang bertumpu pada kepentingan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.¹⁷

Hakim dalam pertimbangan hukumnya akan mempertimbangkan juga kondisi perilaku isteri atau Ibu untuk memelihara anak. Selain itu dalam perkara hukum yang menyangkut kepentingan anak hakim sebelum memutuskan siapa yang berhak atas kuasa ahak asuh anak dapat juga meminta pendapat atau aspirasi dari si anak itu sendiri. Hal ini juga tidak terlepas dari kewajiban hakim untuk memutus suatu perkara dengan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 51-52.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Dra. Hj. Rusmulyani, Hakim Pengadilan Agama Malang, Pada tanggal 21 Juni 2013.

seadil-adilinya dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan. Tentunya hakim juga harus mempertimbangkan tingkat kecerdasan dan usia si anak tersebut.¹⁸

Adapun bentuk penerapan mengenai pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* dalam Perkara No.823/Pdt.G/2011/PA.Mlg dengan responden Drs. Munasik, M.H di Pengadilan Agama Malang tersebut adalah berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “*Pemeliharaan yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya*”. Namun demikian ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut akan berlaku mutlak dalam kondisi normal, yakni bila Ibu dari anak tersebut berbudi pekerti, berakhlak baik dan terpuji. Yang diharapkan dapat membentuk kepribadian dan akhlak yang terpuji sehingga menjadi anak yang sholeh.

Tetapi bila Ibu dari anak tersebut mempunyai kepribadian dan akhlak yang tercela maka sangat diragukan untuk dapat membimbing dan mendidik anak tersebut kelak menjadi anak yang sholeh dan berakhlak mulia. Oleh karena itu ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tidak ladi mengikat, patut dikesampingkan dan berubah berdasarkan *illat* hukumnya demi kemaslahatan anak tersebut, hal mana sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang artinya “*Hukum itu tergantung pada illatnya, baik tetapnya maupun hilangnya illat*”. Artinya hukum bias berubah sesuai dengan *illat* hukumnya.¹⁹

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Dra. Hj. Rusmulyani, Hakim Pengadilan Agama Malang, Pada tanggal 21 Juni 2013.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Drs. Munasik, M.H, Hakim Pengadilan Agama Malang, Pada tanggal 28 May 2013.

Dari hasil wawancara dengan Dra. Hj. Rusmulyani, dapat dikatakan bahwa pemberian hak asuh kepada salah satu pihak, baik itu diberikan kepada pihak Ayah atau Ibu, sekali-kali tidak menghilangkan hubungan antara Ayah atau Ibu yang tidak mempunyai hak asuh dengan anak tersebut. Hal ini dapat dimohonkan agar dituangkan dalam putusan perkara tersebut yang sesuai dengan permohonan para pihak, agar pihak Ibu atau Ayah sewaktu-waktu dapat bertemu dengan anak-anaknya dengan pengetahuan dari Ayah dan juga Ibu yang mempunyai hak asuh atas anak tersebut. Namun bisa saja jika kesepakatan antara mantan isteri dan mantan suami ini terjadi tanpa harus dimintakan putusan di pengadilan. Jadi dipersilahkan baik Ayah dan juga Ibunya untuk membahas dan memusyawarahkan terkait dengan waktu kunjungan untuk anak tersebut.²⁰

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Adapun faktor-faktor penyebab Majelis Hakim dalam memutus perkara terhadap pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah sebagai akibat perceraian. Ada 2 (dua) faktor yang paling mendasar, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

²⁰ Hasil Wawancara dengan Dra. Hj. Rusmulyani, Hakim Pengadilan Agama Malang, Pada tanggal 21 Juni 2013.

1) Faktor Spiritual

Yang dimaksud Faktor Spiritual itu adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki. Spiritual juga berarti kejiwaan, rohani, bathin, mental dan moral. Dalam putusan Perkara No. 823/Pdt.G/2011/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang dapat dilihat faktor yang paling utama dalam memutus perkara terhadap pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah sebagai akibat perceraian yaitu dilihat dari segi Akidah anak itu sendiri dan orang tuanya.

2) Faktor Materi

Yang dimaksud Faktor Materi adalah dilihat dari segi kemampuan biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang merupakan masalah penting untuk menjamin sebab anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut tidak tahu menahu dan tidak bersalah atas perceraian orang tuanya. Pada dasarnya bagi anak yang belum *mumayyiz* itu hak asuhnya ada pada Ibunya, tetapi secara materi atau biaya hidupnya ada dari Ayahnya. Apabila Ayah tidak bertanggungjawab dan tidak mampu dari segi materi maka pemeliharaan anak itu akan berada di pihak Ibunya.

- b. Bentuk penerapan mengenai pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* dalam Perkara No.823/Pdt.G/2011/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang tersebut adalah berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut akan berlaku mutlak dalam

kondisi normal, yakni bila Ibu dari anak tersebut berbudi pekerti, berakhlak baik dan terpuji. Yang diharapkan dapat membentuk kepribadian dan akhlak yang terpuji sehingga menjadi anak yang sholeh. Tetapi bila Ibu dari anak tersebut mempunyai kepribadian dan akhlak yang tercela maka sangat diragukan untuk dapat membimbing dan mendidik anak tersebut kelak menjadi anak yang sholeh dan berakhlak mulia. Oleh karena itu ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tidak ladi mengikat, patut dikesampingkan dan berubah berdasarkan *illat* hukumnya demi kemaslahatan anak tersebut, hal mana sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang artinya

2. Saran

- a. Bagi Pemerintah, perlu adanya untuk meninjau kembali terhadap Pasal 105 KHI tentang batas usia *mumayyiz* tersebut, untuk konteks anak Indonesia pada masa sekarang usia 12 Tahun tersebut tidaklah sesuai, ada juga yang telah mapan secara otak dan berfikirnya tetapi dari segi umur masih belum mencukupi, agar dikemudian hari jika ditemukan lagi kasus yang serupa tidak menimbulkan kekeliruan.
- b. Bagi Masyarakat, agar para orang tua hendaknya menjelaskan kepada si anak bahwa perceraian antara orang tua tersebut tidak akan mengurangi rasa kasih sayang mereka terhadap anak-anaknya dengan cara berkunjung, menelepon atau komunikasi lain yang bisa membuat si anak merasa perhatiannya selalu ada di hati kedua orang tuanya walaupun telah berpisah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

- Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perdata Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 1993.
- Achmad Ichsan, **Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam**, CV. Muliastari cet. 1, Jakarta, 1996.
- Adib Bahari, **Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Ali Yafie, **Teologi Sosial Telaah Kritis terhadap Persoalan Agama dan Kemanusiaan**, cet.1, LKPSM, Yogyakarta, 1997.
- Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soejono Soekanto, **Pengantar Ilmu Hukum**, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 1986.
- Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

B. Putusan

No. 823/Pdt.G/2011/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI).